

PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Felia Permatasari & Luky Patricia Widianingsih
Universitas Ciputra Surabaya

***Abstract:** The purpose of this studies is to know how the influence of CSR disclosure on financial performance with GCG as a moderating variable. CSR disclosure is measured using CSRD Index based on GRI G4. The dependent variable of this study is financial performance which is proxied by return on assets and return on equity. The GCG moderation variable is proxied by institutional ownership, the size of the board of commissioners and the independent board of commissioners. The sample used in this study is a SOE's company non-financial listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2014–2018. The results of this studies found that CSR disclosure has a positive effect on financial performance (ROA) and CSR disclosure has no effect on financial performance (ROE). GCG variables which are proxied by institutional ownership is not able to moderate the effect of CSR on financial performance (ROA and ROE), the size of the board of commissioners able to strengthen the effect of CSR on financial performance (ROA) and independent board of commissioners is not able to strengthen the effect of CSR on financial performance (ROA), the size of the board of commissioners and independent board of commissioners is not able to moderate the effect of CSR on financial performance (ROE).*

***Keywords:** corporate social responsibility, return on asset (ROA), return on equity (ROE), good corporate governance, BUMN*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan dengan GCG sebagai variabel moderasi. Pengungkapan CSR diukur dengan menggunakan CSRD Index yang berpedoman pada GRI G4. Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diproksikan dengan *return on asset* dan *return on equity*. Variabel moderasi GCG diproksikan dengan kepemilikan institusional, ukuran

*Corresponding Author.
e-mail: fpermatasari@student.ciputra.ac.id

dewan komisaris dan dewan komisaris independen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014–2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA dan pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROE. Variabel GCG yang diproksikan dengan kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan (ROA dan ROE). Variabel GCG yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris dapat memperkuat pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan (ROA), sedangkan dewan komisaris independen dapat memperlemah pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan (ROA). Variabel GCG yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris dan dewan komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan (ROE).

Kata kunci: *corporate social responsibility, return on asset (ROA), return on equity (ROE), good corporate governance, BUMN*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, permasalahan CSR semakin menjadi perhatian yang serius karena muncul berbagai macam isu yang menjadi perdebatan. Isu pertama adalah adanya kegiatan CSR jelas menimbulkan pengeluaran sumber daya keuangan perusahaan, namun pertanyaan apakah kegiatan CSR dapat meningkatkan laba perusahaan masih menjadi pertanyaan penting bagi berbagai kalangan (Kabir dan Thai, 2017). Isu kedua mengenai kualitas CSR di Indonesia. Dari hasil riset yang dilakukan oleh *Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School*, Indonesia berada pada peringkat ketiga dari empat negara di Asia dengan skor 48,6 pada tahun 2016 dan peringkat keempat dengan skor 53,6 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas implementasi CSR di Indonesia masih rendah jika dibanding negara lain di Asia.

Salah satu penyebab rendahnya kualitas CSR di Indonesia adalah mengenai praktik CSR. Di Indonesia pemerintah menetapkan peraturan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang mengungkapkan bahwa perusahaan dengan bentuk usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan ditetapkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal. Namun peraturan ini hanya mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR tanpa adanya pedoman dan panduan pelaksanaan CSR. Kewajiban pelaksanaan CSR tidak hanya untuk perusahaan dengan bentuk usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) saja, tetapi perusahaan BUMN juga diwajibkan melakukan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). PKBL dilakukan dengan dasar Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 serta diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER- 05/MBU/2007 yang menjelaskan bahwa BUMN tidak hanya dituntut untuk meningkatkan laba BUMN saja tetapi juga memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Dana untuk PKBL berasal dari jumlah penyisihan laba bersih maksimal sebesar 2% untuk program kemitraan dan maksimal 2% untuk program bina lingkungan.

BUMN adalah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah sehingga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi Indonesia dengan menambah penerimaan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mampu memberikan kontribusi bagi semua pihak (Sarafina dan Saifi, 2017). Pada perusahaan perseroan (persero) BUMN sebagian sahamnya dimiliki oleh negara Indonesia paling sedikit 51% dari jumlah saham Persero BUMN. Saham ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya. Pemerintah memiliki harapan untuk BUMN Indonesia yaitu agar perusahaan BUMN lebih transparan dan menjadi perusahaan publik, dapat terus berkembang dan berkontribusi bagi perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada masa pemerintahan Jokowi, di mana pemerintah ingin supaya perusahaan BUMN dapat seperti negara Malaysia dan Singapura, yaitu menjadi *holding* BUMN yang diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia jauh lebih baik (Cakti, 2016).

Dalam upaya mengoptimalkan kinerja BUMN, pemerintah mengeluarkan Undang- Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengungkapkan bahwa pengelolaan BUMN harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Undang-undang ini juga diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang baik, hal ini mengharuskan setiap Badan Usaha Milik Negara menerapkan tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Selain aturan, banyak penghargaan yang diadakan untuk BUMN maupun non-BUMN terkait CSR dan GCG dengan tujuan agar

perusahaan dapat saling berlomba dan bersaing secara sehat memberikan yang terbaik demi keberlanjutan perusahaan.

Perusahaan BUMN tahun 2014–2018 banyak yang mendapatkan penghargaan terkait CSR dan GCG. Dari segi aturan dan penghargaan yang didapat oleh BUMN, diduga bahwa penerapan GCG di BUMN sudah baik, implementasi dan pengungkapan CSR sudah baik, yang salah satunya dapat dibuktikan dengan menang *award* CSR dan GCG. Hal ini diperkuat oleh Wang dan Sarkis (2017) yang menyimpulkan bahwa kinerja keuangan yang baik berhubungan dengan implementasi CSR yang baik pula, di mana penerapan GCG yang baik dan serius dapat memberikan hasil pengungkapan CSR yang baik.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan. Penelitian dilakukan oleh Gantino (2016), Suciwati *et al.* (2016), dan Madichie, *et al.* (2018) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan hasil penelitian Parengkuan (2017) dan Fitriya dan Setyorini (2019) menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh pada kinerja keuangan. Penelitian dengan menggunakan GCG sebagai variabel moderasi masih jarang ditemui di Indonesia. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Kabir dan Thai (2017) yang menjelaskan bahwa perusahaan yang aktif melakukan kegiatan CSR dapat meningkatkan kinerja keuangan. Penelitian ini juga meneliti GCG dengan indikator ukuran dewan komisaris dan dewan komisaris independen memperkuat hubungan positif antara CSR dan kinerja keuangan tetapi tidak ada pengaruh pada kepemilikan institusional.

Penelitian ini menggunakan GCG sebagai variabel moderasi dengan menggunakan indikator ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar dapat memperkuat hubungan CSR pada kinerja keuangan karena penanganan permasalahan dapat diselesaikan dengan efektif (Kabir dan Thai, 2017). Komisaris independen dapat menjadi pemantau yang efektif karena tidak terlibat dalam manajemen perusahaan sehingga dapat memberikan solusi yang lebih objektif mengenai permasalahan aktivitas yang akan dilakukan perusahaan (Kabir dan Thai, 2017). Kepemilikan institusional dapat berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan karena sebagian besar pemegang saham memilih berinvestasi pada perusahaan dapat memberikan laba yang tinggi (Rimardhani *et al.*, 2016). Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah (1)

apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA dan ROE); (2) apakah GCG dengan indikator kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan dewan komisaris independen dapat memoderasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan (ROA dan ROE).

LANDASAN TEORI

Signalling Theory

Signalling theory menurut Ross (1977) bahwa pihak manajemen perusahaan yang memiliki informasi baik mengenai perusahaannya akan secepat mungkin menyampaikan informasi tersebut ke publik. *Signalling theory* bertujuan untuk memberikan sinyal baik kepada investor dan dapat mempermudah investor dalam pengambilan keputusan. Perusahaan memberikan sinyal baik kepada investor dengan menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dan tepat waktu. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kualitas baik (Irma, 2019).

Pengungkapan CSR dan pelaporan GCG yang dilakukan perusahaan menjadi salah satu informasi yang memberikan sinyal pada stakeholder di mana hal ini dapat memengaruhi fluktuasi laba perusahaan. Dengan adanya pengungkapan CSR dan pelaporan GCG ini diharapkan perusahaan dapat memberikan sinyal yang baik kepada investor sehingga investor dapat mengambil keputusan terkait penanaman modal pada suatu perusahaan (Rokhlinsari, 2016).

Pengungkapan Corporate Social Responsibility

Pengungkapan CSR adalah proses pengomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Gray, 1995). Menurut Lesmana, Maimunah, dan Panjaitan (2016), terdapat dua sifat pengungkapan yaitu pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan atau standar (*mandatory disclosure*) seperti aturan untuk perusahaan perseroan yang menjalankan usaha yang berkaitan dengan SDA wajib melaksanakan CSR dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*).

Pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan dapat menggunakan *global reporting initiative* (GRI) dengan indikator pengungkapan yang berfokus

pada lingkungan, ekonomi, dan sosial dengan pedoman *triple bottom line* sebagai dasar keberlanjutan. GRI adalah standar pengungkapan dunia yang dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat laporan pengungkapan CSR dan dapat memberi manfaat kepada *stakeholder*. *Corporate social responsibility disclosure index* (CSRDI) menggunakan rumus sebagai berikut.

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Sumber: Sembiring (2005)

Keterangan:

CSR_{ij} : *Corporate social responsibility disclosure index* Perusahaan j

N_j : Jumlah item untuk Perusahaan j, $n_j \leq 149$

X_j : 1 = jika item diungkapkan, 0 = jika item tidak diungkapkan

Good Corporate Governance

Good corporate governance (GCG) merupakan sebuah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memperhatikan kepentingan *stakeholder* (Pratiwi, 2016). Di Indonesia, terdapat badan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang bertugas untuk merumuskan dan merekomendasikan kebijakan yang baik mengenai tata kelola pengelolaan perusahaan (Djamilah dan Surenggono, 2017). Dalam *code of corporate governance* yang dibuat oleh KNKCG terdapat lima prinsip yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

1. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki pemerintah, institusi berbadan hukum, dana perwakilan, institusi asing, dan sebagainya yang dapat memonitor manajemen dalam pengelolaan perusahaan (Rimardhani, Hidayat, Dwiatimanto, 2016). Rumus kepemilikan institusional:

Sumber: Laurent dan Salim (2019)

2. Ukuran dewan komisaris

Menurut teori agensi, dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengawasi tindakan manajemen puncak. Dengan adanya dewan komisaris dapat memberikan pengaruh luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial dan lebih bertanggung jawab kepada *stakeholder* (Djamilah dan Surenggono, 2017).

$$DK = \sum \text{Dewan Komisaris}$$

Sumber: Irma (2019)

3. Dewan komisaris independen (DKI)

Dewan komisaris independen adalah pihak yang tidak berhubungan dengan pengelolaan perusahaan (Rimardhani, Hidayat, Dwiatiyanto, 2016). Jumlah dewan komisaris independen yang proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham setidaknya adalah 30% dari seluruh anggota komisaris.

$$\text{Komisi Independen} = \frac{\sum \text{DKI}}{\sum \text{Dewan komisaris}}$$

Sumber: Irma (2019)

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dianggap sebagai penentuan ukuran yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Suciwati dan Ardina, 2016). Penilaian kinerja keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan di mana laporan ini berisikan data-data mengenai informasi kinerja perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan yang dapat membantu semua pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan (Sarafina dan Saifi, 2017). Cara mengukur kinerja keuangan dalam laporan keuangan, salah satunya adalah dengan menggunakan rasio profitabilitas.

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA dan ROE yang menjadi indikator kinerja keuangan yang sering digunakan. ROA menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh aktiva yang dimiliki (Sarafina dan Saifi, 2017). Rumus ROA:

$$\text{ROA} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Asset}}$$

Sumber: Brigham dan Houston (2014)

ROE menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan dan memanfaatkan modalnya untuk menghasilkan laba perusahaan (Barus, 2016). Peneliti menggunakan ROE karena merupakan hasil akhir dari semua kegiatan dan keputusan yang diproses dengan ROE. Rumus ROE:

$$\text{ROE} = \frac{\text{EAT}}{\text{Total Equity}}$$

Sumber: Suciwati *et al.*, (2016)

Hipotesis Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Kinerja Keuangan

Implementasi CSR yang baik dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dengan dilaksanakannya CSR mengindikasikan bahwa perusahaan mulai sadar akan keberlanjutan usaha perusahaan. Penelitian tentang pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan telah banyak dilakukan dengan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Gantino (2016), Suciwati, Pradnyan, dan Ardina (2016), dan Madichie *et al.* (2018) berkesimpulan bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, yang berarti dalam pengambilan keputusan, investor mempertimbangkan informasi CSR sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan berinvestasi. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

H_{1a}: *Corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA).

H_{1b}: *Corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROE).

Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Kinerja Keuangan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi

Kepemilikan institusional pada suatu perusahaan akan berpengaruh pada pengambilan keputusan dan aktivitas perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi khususnya perusahaan BUMN maka perusahaan akan terdorong untuk melakukan pengungkapan CSR yang lebih luas (Yuan Hu, 2016). Dengan adanya pengungkapan CSR yang lebih luas ini akan berpengaruh

pada keberlanjutan suatu perusahaan pada jangka panjang, dibandingkan yang tidak mengungkapkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Rimardhani *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa GCG dengan indikator kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Penelitian (Jayanti & Husaini, 2018) juga menunjukkan bahwa GCG yang diproksikan dengan kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama pada CSR *disclosure*. Menurut (Kabir & Thai, 2017) kepemilikan institusional dapat memengaruhi CSR dan kinerja keuangan. Dengan adanya kepemilikan institusional ini diduga dapat memoderasi pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan (ROA dan ROE). Dari hal tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

H_{2a}: Variabel moderasi *good corporate governance* (GCG) dengan kepemilikan institusional memperkuat pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan (ROA).

H_{2b}: Variabel moderasi *good corporate governance* (GCG) dengan kepemilikan institusional memperkuat pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan (ROE).

Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Kinerja Keuangan dengan Ukuran Dewan Komisaris sebagai Variabel Moderasi

Dewan komisaris bertujuan untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada dewan direksi seputar kegiatan operasional perusahaan. Jumlah dewan komisaris dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan, semakin besar ukuran dewan komisaris maka perusahaan akan lebih cepat dan efektif dalam menyelesaikan masalah perusahaan (Kemerink, 2018). Jumlah dewan komisaris ini juga akan berpengaruh pada pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan yang akan berdampak pada kinerja perusahaan. Hasil penelitian (Jayanti & Husaini, 2018) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan pada CSR, sedangkan penelitian (Listyaningsih, Dewi, & Baiti, 2017) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh pada CSR. Dari penelitian-penelitian terdahulu diduga ukuran dewan komisaris dapat memoderasi pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan sehingga hipotesis moderasi ukuran dewan komisaris sebagai berikut.

- H_{2c}: Variabel moderasi *good corporate governance* (GCG) dengan ukuran dewan komisaris memperkuat pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan (ROA).
- H_{2d}: Variabel moderasi *good corporate governance* (GCG) dengan ukuran dewan komisaris memperkuat pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan (ROE).

Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Kinerja Keuangan dengan Ukuran Dewan Komisaris sebagai Variabel Moderasi

Dewan komisaris independen adalah dewan yang berasal dari luar perusahaan sehingga tidak memiliki hubungan apa pun dengan perusahaan dan diharapkan dapat memberikan masukan lebih objektif kepada keberlanjutan suatu perusahaan. Semakin besar jumlah dewan komisaris independen maka kinerja keuangan perusahaan dapat meningkat karena perusahaan mempunyai orang-orang yang kompeten dalam menjalankan perusahaan serta memberikan keputusan yang baik terutama untuk aktivitas dan pengungkapan CSR suatu perusahaan (Riyadh, Sukoharsono dan Alfaiza, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian (Jayanti & Husaini, 2018) tentang pengaruh *good corporate governance* (GCG) terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) menunjukkan bahwa GCG yang diproksikan dengan dewan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama pada CSR disclosure. Penelitian (Iarasati, Titisari, & Nurlaela, 2017) tentang pengaruh *good corporate governance* (gcg) dan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan, menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dari hal tersebut diduga dewan komisaris independen dapat memoderasi pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

- H_{2e}: Variabel moderasi *good corporate governance* (GCG) dengan dewan komisaris independen memperkuat pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan (ROA).
- H_{2f}: Variabel moderasi *good corporate governance* (GCG) dengan dewan komisaris independen memperkuat pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan (ROE).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan dengan *good corporate governance* (GCG) sebagai variabel moderasi. Penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014:55).

Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan BUMN non-finansial yang terdaftar di BEI tahun 2014–2018. Metode sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan data keuangan secara lengkap selama periode 2014–2018.
2. Perusahaan BUMN yang mengungkapkan CSR dengan standar GRI G4 periode 2014–2018.
3. Perusahaan yang memiliki data lengkap untuk variabel yang digunakan pada periode 2014–2018.
4. Perusahaan tidak mengalami kerugian dari periode 2014–2018.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan metode regresi. Persamaan untuk menguji hipotesis dinyatakan dalam model regresi berikut.

$$ROA = \alpha + \beta_1 CSR_D + e \dots\dots\dots(1)$$

$$ROE = \alpha + \beta_1 CSR_D + e \dots\dots\dots(2)$$

$$ROA = \alpha + \beta_1 CSR_D + \beta_2 KI + \beta_3 [CSR_D - KI] + e \dots\dots\dots(3)$$

$$ROA = \alpha + \beta_1 CSR_D + \beta_2 UDK + \beta_3 [CSR_D - UDK] + e \dots\dots\dots(4)$$

$$ROA = \alpha + \beta_1 CSR_D + \beta_2 DKI + \beta_3 [CSR_D - DKI] + e \dots\dots\dots(5)$$

$$ROE = \alpha + \beta_1 CSR_D + \beta_2 KI + \beta_3 [CSR_D - KI] + e \dots\dots\dots(6)$$

$$ROE = \alpha + \beta_1 CSR_D + \beta_2 UDK + \beta_3 [CSR_D - UDK] + e \dots\dots\dots(7)$$

$$ROE = \alpha + \beta_1 CSR_D + \beta_2 DKI + \beta_3 [CSR_D - DKI] + e \dots\dots\dots(8)$$

Keterangan:

ROA = *Return on asset*

ROE = *Return on equity*

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien

CSRSD = *Corporate social responsibility disclosure*

KI = Kepemilikan institusional

UDK = Ukuran dewan komisaris

DKI = Dewan komisaris independen

[CSRSD-KI] = Interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan CSRSD dan KI

[CSRSD-UDK] = Interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan CSRSD dan UDK

[CSRSD-DKI] = Interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan CSRSD dan DKI

E = *Error term*

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan perusahaan dan diolah menggunakan aplikasi SPSS 20. Dari *purposive sampling*, diperoleh sampel yang memenuhi kriteria penelitian sebanyak 51 sampel.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 1, nilai minimum CSRSD adalah 0,00, nilai maksimum CSRSD adalah 0,8121, nilai *mean* CSRSD perusahaan BUMN adalah 0,4223, dan standar deviasi CSRSD sebesar 0,1595. Nilai minimum ROA adalah 0,0043, nilai maksimum ROA sebesar 0,2837, nilai *mean* adalah 0,0843, dan standar deviasi sebesar 0,0725. Nilai minimum ROE adalah 0,0035, nilai maksimum ROE sebesar 0,3295, nilai *mean* ROE sebesar 0,1324, dan standar deviasi adalah sebesar 0,0844. Nilai minimum KI adalah 0,9148, nilai maksimum KI sebesar

1,00, nilai mean KI sebesar 0,989, dan standar deviasi adalah sebesar 0,158. Nilai minimum UDK adalah 2, nilai maksimum adalah sebesar 9, nilai *mean* UDK sebesar 6,18, dan standar deviasi adalah sebesar 0,932. Nilai minimum DKI adalah 0,2857, nilai maksimum DKI adalah 0,5000, nilai *mean* sebesar 0,3570, dan nilai standar deviasi sebesar 0,0557.

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	51	.00	.8121	.4223	.1595
ROA	51	.0043	.2837	.0843	.0725
ROE	51	.0035	.3295	.1324	.0844
KI	51	.9148	.1000	.9832	.0242
UDK	51	2.00	9.00	6.18	.0932
DKI	51	.2857	.5000	.3570	.0557
Valid N (listwise)	51				

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov*, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ semua model regresi berdistribusi normal. Hasil multikolinearitas pada semua variabel menunjukkan bahwa nilai VIF seluruh variabel < 10 , sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada setiap variabel yang digunakan. Hasil uji autokorelasi dengan *run test* yang dilakukan untuk semua model menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *spearman's rho* menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa semua model regresi bebas dari heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Sederhana

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa uji regresi linear sederhana ini dilakukan untuk model 1 dan 2. Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa model regresi linear sederhana dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut.

Tabel 2 Hasil Regresi Sederhana

	Model 1	Model 2
C	3,308 1,173	10,990 3,244
CSR	0,121 1,938**	0,053 0,709
F-statistik	3,756	0,503
Sig F	0,058**	0,482
R-Squared	0,071	0,010
Adjusted R-Squared	0,052	-0,010
* tingkat signifikansi 5%		
** tingkat signifikansi 10%		

Uji Regresi Moderasi dengan Uji Nilai Selisih Mutlak

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa uji regresi moderasi pada penelitian ini menggunakan metode uji nilai selisih mutlak. Pengujian dilakukan untuk model 3 sampai 8. Hasil uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa model regresi moderasi dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut.

Tabel 3 Hasil Regresi Moderasi dengan Uji Nilai Selisih Mutlak

Variabel	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6	Model 7	Model 8
<i>Constant</i>	8,543 9,625*	13,398 12,833	8,282 9,838*	13,119 11,855	0,8441 8,685	13,254 11,360
CSR	0,897 0,986	-0,462 -0,432	2,671 2,921*	1,427 1,187	2,130 2,156*	1,087 0,917
KI	-3,965 -3,912*	-5,043 -4,231*				
UDK			5,210 4,554*	4,622 3,073*		
DKI					0,518 0,527	0,581 0,492
[CSR-DKI]	0,419 0,576	0,583 0,681				
[CSRUDK]			1,954 2,887*	1,602 1,800**		
[CSR-DKI]					-1,271 -1,808**	-1,542 -1,826**
Adjusted R-Square	0,274	0,257	0,315	0,125	0,084	0,024
* tingkat signifikansi 5%						
** tingkat signifikansi 10%						

Uji Hipotesis Uji F (Uji Kelayakan Model)

1. Regresi linear sederhana

Pada lampiran Tabel 2 menunjukkan nilai signifikansi uji F untuk ROA (Y1) sebesar $0,058 < 0,1$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). Sedangkan nilai signifikansi uji F untuk ROE (Y2) sebesar $0,482 > 0,05$ dan $0,1$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROE).

2. Regresi moderasi dengan uji nilai selisih mutlak

Pada lampiran Tabel 3 menunjukkan nilai signifikansi uji F untuk pengungkapan CSR dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan (ROA) sebesar $0,000 < 0,05$ (tingkat signifikansi 5%). Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR, kepemilikan institusional, dan interaksi variabel moderasi [CSR-DKI] berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan (ROA). Nilai signifikansi uji F pengungkapan CSR dan ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan (ROA) sebesar $0,000 < 0,05$ (tingkat signifikansi 5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR, ukuran dewan komisaris, dan interaksi variabel moderasi [CSR-DUDK] berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan (ROA). Pada nilai signifikansi uji F pengungkapan CSR dan dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan (ROA) sebesar $0,069 < 0,1$ (tingkat signifikansi 10%), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR, dewan komisaris independen, dan interaksi variabel moderasi [CSR-DKI] berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan (ROA).

Nilai signifikansi uji F untuk pengungkapan CSR dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan (ROE) sebesar $0,001 < 0,05$ (tingkat signifikansi 5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR, kepemilikan institusional, dan interaksi variabel moderasi [CSR-DKI] berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan (ROE). Nilai signifikansi uji F untuk pengungkapan CSR dan ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan (ROE) sebesar $0,026 < 0,05$ (tingkat signifikansi 5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR, ukuran dewan komisaris dan interaksi variabel moderasi [CSR-DUDK] berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan (ROE). Pada nilai signifikansi uji F

untuk pengungkapan CSR dan dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan (ROE) sebesar $0,252 > 0,05$ dan $0,1$ sehingga data disimpulkan bahwa pengungkapan CSR, dewan komisaris independen, dan interaksi variabel moderasi [CSR- DKI] tidak berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan (ROE).

Uji t

1. Regresi linear sederhana

Hasil regresi sederhana diperoleh nilai signifikansi variabel pengungkapan CSR $0,058 < 0,1$ dan memiliki koefisien positif untuk variabel dependen yang diproksikan dengan ROA. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA), sehingga dapat disimpulkan bahwa H1a diterima. Sedangkan untuk variabel pengungkapan CSR dengan variabel dependen yang diproksikan dengan ROE diperoleh nilai signifikansi $0,482 > 0,05$ dan $0,1$ dan memiliki koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROE), sehingga dapat disimpulkan bahwa H1b ditolak.

2. Regresi moderasi dengan uji nilai selisih mutlak

Nilai signifikansi untuk variabel moderasi kepemilikan institusional sebesar $0,567 > 0,05$ memiliki koefisien positif yang berarti variabel moderasi kepemilikan institusional tidak signifikan, sehingga H2a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan (ROA). Pada model 5 diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$ memiliki koefisien positif yang berarti variabel moderasi ukuran dewan komisaris signifikan, sehingga H2c diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dapat memperkuat pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan (ROA). Pada model 7 diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,077 < 0,1$ memiliki koefisien negatif yang berarti variabel moderasi dewan komisaris independen signifikan, sehingga H2e ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dapat memperlemah pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan (ROA).

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

1. Regresi linear sederhana

Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel independen pengungkapan CSR memiliki pengaruh sebesar 5,2% untuk menjelaskan variabel dependen kinerja keuangan (ROA), sedangkan sisanya 94,8% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti oleh peneliti.

2. Regresi moderasi dengan uji nilai selisih mutlak

Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel moderasi GCG yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris dapat memoderasi variabel independen yaitu pengungkapan CSR terhadap variabel dependen kinerja keuangan (ROA) sebesar 31,5%, sedangkan sisanya 69,5% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti oleh peneliti. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel moderasi GCG yang diproksikan dengan dewan komisaris independen dapat memoderasi variabel independen yaitu pengungkapan CSR terhadap variabel dependen kinerja keuangan (ROA) sebesar 8,4%, sedangkan sisanya 91,6% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti oleh peneliti.

Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel moderasi GCG yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris dapat menjelaskan variabel independen yaitu pengungkapan CSR terhadap variabel dependen kinerja keuangan (ROE) sebesar 12,5%, sedangkan sisanya 87,5% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti oleh peneliti. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel moderasi GCG yang diproksikan dengan dewan komisaris independen dapat memoderasi variabel independen yaitu pengungkapan CSR terhadap variabel dependen kinerja keuangan (ROE) sebesar 2,4%, sedangkan sisanya 97,6% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti oleh peneliti.

Pembahasan Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) pada tingkat signifikansi 10% sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1a pada penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan aktivitas CSR yang semakin luas dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (ROA).

Pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan ini sejalan dengan teori *triple bottom line (profit, people and planet)* sebagai dasar keberlanjutan yang menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada laba saja tetapi juga berkontribusi pada *stakeholder* dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan (Sahla dan Aliyah, 2016). Teori *triple bottom line* dipakai untuk pedoman GRI G4 yang menjelaskan bahwa perusahaan dalam melakukan pengungkapan CSR bukan hanya sebagai kewajiban dari pemerintah saja tetapi juga sebagai upaya bentuk tanggung jawab dan peduli akan lingkungan, sosial dan ekonomi. Dengan melakukan aktivitas CSR dan mengungkapkan CSR maka memungkinkan perusahaan tetap *sustain* dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, nilai rata-rata perusahaan mengungkapkan CSR dengan pedoman GRI G4 sebesar 42,23% dengan nilai minimum 0% dan nilai maksimum 81,21%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan BUMN sudah melakukan pengungkapan CSR dengan cukup luas dan BUMN memperhatikan faktor lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola perusahaan. Sesuai dengan tujuan pemerintah bahwa BUMN tidak hanya mementingkan laba saja tetapi juga lingkungan sekitar dan ikut membantu menyejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan *signalling theory* yang menjelaskan perusahaan akan berusaha untuk sebaik mungkin dalam memberikan informasi kepada perusahaan karena dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Ross, 1977).

Hasil penelitian regresi linear sederhana pada SPSS menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROE, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H1b ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, tidak akan memengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan ROE.

Perusahaan BUMN sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pemasukan bagi pemerintah. Hal ini memungkinkan bahwa kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROE bukanlah faktor utama yang diperhatikan dalam pengambilan keputusan bagi investor. Hal ini dikarenakan kinerja keuangan perusahaan BUMN akan berbeda dengan perusahaan non BUMN, dari segi ROE untuk perusahaan BUMN akan lebih terjamin karena sebagian besar modal yang

dimiliki BUMN adalah milik pemerintah, sedangkan untuk perusahaan non BUMN akan berusaha untuk sebaik mungkin menjalankan aktivitas operasionalnya untuk mendapatkan modal dari investor.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sakti (2017) dan Mansaray *et al.* (2017) yang mengungkapkan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan untuk ROE. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa walaupun pengungkapan CSR sudah cukup luas namun tidak dapat meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan, tetapi dapat berperan memperbaiki dan menaikkan reputasi perusahaan dalam jangka panjang sehingga perusahaan dapat tetap *sustain*.

Berdasarkan penelitian Yuan Hu (2016) menyatakan bahwa kualitas pengungkapan CSR yang paling baik adalah BUMN dibanding perusahaan lain. Dengan adanya kualitas pengungkapan yang baik diharapkan dapat menarik investor dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Namun pengungkapan CSR bukan satu-satunya faktor yang menjadi pertimbangan investor dalam mengambil keputusan. Investor memiliki faktor-faktor lain, seperti *neutral information, accounting information, self image, personal financial needs* (Christanti dan Mahastanti, 2011).

Pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan dengan GCG sebagai variabel moderasi

1. Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian menggunakan SPSS menunjukkan bahwa GCG dengan indikator kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan (ROA dan ROE). Hasil ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $> 0,05$ dan $0,1$ serta koefisien bernilai positif, sehingga H2a dan H2b ditolak. Hal ini berarti semakin tinggi atau rendah proporsi kepemilikan institusional tidak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan.

Secara teoretis, kepemilikan institusional pada perusahaan BUMN akan membawa perusahaan semakin erat dengan pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sinergi pemerintah dan BUMN di mana saham yang dimiliki pemerintah pada BUMN $> 51\%$ dan BUMN memiliki tujuan untuk membantu

pemerintah dalam pembangunan perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya program BUMN Hadir untuk Negeri (UU Nomor 19 Tahun 2003). Selain itu pemerintah juga memiliki aturan mengenai CSR pada perusahaan BUMN, yaitu program PKBL yang diharapkan aktivitas CSR yang dilakukan BUMN dapat memberikan manfaat bagi perusahaan serta kinerja keuangan perusahaan dapat meningkat.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 98,32% artinya pemerintah turut serta dalam manajemen BUMN, pengungkapan CSR BUMN juga sudah cukup luas dengan rata-rata 42,23%, nilai rata-rata ROA sebesar 8,43% dan ROE sebesar 13,24% yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan BUMN sudah baik. Namun hasil regresi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memoderasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan. Hal ini diduga karena sistem pengawasan pemerintah masih kurang ketat terhadap GCG perusahaan BUMN, walaupun sudah terdapat Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang bertujuan untuk mengawasi BUMN

2. Ukuran dewan komisaris sebagai variabel moderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dapat memperkuat pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan (ROA). Hasil ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga H2c dan H2d diterima. Hal ini berarti semakin besar ukuran dewan komisaris dapat memperkuat pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan (ROA), begitu pun sebaliknya.

Semakin besar ukuran dewan komisaris dianggap dapat mengurangi adanya manajemen laba dan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan karena jumlah dewan komisaris yang semakin besar dapat membagi tugas-tugas dengan lebih efisien dan pengawasan dapat lebih ketat (Riyadh, Sukoharsono dan Alfaiza, 2019). Dapat dilihat dari hasil statistik deskriptif ukuran dewan komisaris memiliki nilai *minimum* sebesar dua orang dan maksimum sebesar sembilan orang, dengan nilai rata-rata sebesar 6,18%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan BUMN sudah mematuhi aturan yang ditetapkan oleh POJK No. 33/POJK.04/2014, yaitu minimal jumlah dewan komisaris sebanyak 2 orang.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menjelaskan bahwa jumlah anggota dewan komisaris bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dan memastikan bahwa GCG perusahaan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya dewan komisaris yang semakin besar, maka pembagian tugas untuk melakukan pengawasan dan *controlling* akan jauh lebih mudah. Pengawasan terhadap perusahaan dapat lebih ketat dan efisien karena dapat meminimalisasi adanya kecurangan dalam suatu manajemen perusahaan.

3. Dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dapat memperlemah pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan (ROA). Hasil ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga H2e dan H2f ditolak. Hal ini berarti semakin besar jumlah dewan komisaris independen dapat memperlemah pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan (ROA).

Secara teoretis jumlah dewan komisaris independen yang semakin besar akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena perusahaan memiliki orang yang kompeten dalam menjalankan perusahaan, memberi masukan, dan mengambil keputusan bagi perusahaan (Riyadh, Sukoharsono dan Alfaiza, 2019).

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa besar jumlah dewan komisaris independen maka dapat memperlemah pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan (ROA). Hal ini dikarenakan dewan komisaris independen adalah orang dari luar perusahaan yang kurang memahami tentang perusahaan sehingga dalam pengambilan keputusan kurang tepat jika dibanding dengan dewan komisaris perusahaan. Selain itu memungkinkan juga dewan komisaris independen yang diangkat tidak kompeten karena kurang memiliki informasi mengenai perusahaan dan mungkin diusulkan oleh dewan komisaris perusahaan sehingga antara dewan komisaris independen dan dewan komisaris perusahaan memiliki hubungan yang dapat mengakibatkan bias (Kemerink, 2018).

Pada perusahaan BUMN jumlah dewan komisaris independen memiliki kriteria minimal dan telah diatur pada Peraturan Menteri BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG pada BUMN, komposisi dewan komisaris independen paling sedikit adalah 30% dari jumlah dewan komisaris. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa

nilai minimum dewan komisaris independen sebesar 28,57% dan nilai maksimum sebesar 50% dengan rata-rata 35,7%. Hal itu menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen secara keseluruhan pada perusahaan BUMN lebih dari syarat yang ditentukan dan tidak melebihi 50%, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan BUMN telah memenuhi aturan yang berlaku dan tetap menjaga komposisi antara dewan komisaris dengan dewan komisaris independen agar tetap seimbang dan pengelolaan GCG perusahaan dapat berjalan dengan baik.

Implikasi

Implikasi penelitian ini bagi perusahaan adalah perusahaan dapat memilah kegiatan CSR sesuai dengan karakter sektor masing-masing BUMN. Perusahaan dapat lebih fokus pada kegiatan seperti efisiensi sumber daya lingkungan, pengelolaan limbah, dan program pelatihan tenaga kerja yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang dibandingkan program *charity* dan *sponsorship* yang tidak berkelanjutan. Dengan adanya kegiatan tersebut memungkinkan lebih diperhatikan dan dipertimbangkan oleh investor dan masyarakat. Memperkuat informasi pengungkapan CSR sehingga informasi yang ingin disampaikan perusahaan dapat ditangkap dengan baik oleh investor dan masyarakat. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah seperti dengan memberikan edukasi kepada investor dan masyarakat tentang peduli lingkungan, membuat *campaign* tentang peduli lingkungan dan aktivitas CSR yang telah dilakukan perusahaan, serta menunjukkan dampak positif dari kegiatan CSR tersebut.

Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi investor dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan. Investor dapat lebih peduli lingkungan dan tidak hanya mementingkan laba saja. Investor dapat lebih terbuka dan melihat bahwa dengan adanya tanggung jawab sosial (CSR) maka reputasi suatu perusahaan akan meningkat di mata masyarakat dan perusahaan akan cenderung dapat bertahan lebih lama dibanding perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial (CSR). Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan edukasi mengenai prinsip CSR untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan penerapan GCG BUMN oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat lebih terbuka terhadap perusahaan BUMN dan dapat

melihat dampak positif dari kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan, yang dapat membuat persepsi masyarakat jadi positif terhadap perusahaan. Karena tujuan BUMN sendiri untuk menyejahterakan masyarakat sehingga seharusnya dampak dari CSR pun juga akan dirasakan oleh masyarakat dengan baik jika masyarakat mau terbuka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil regresi linier sederhana pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan dan analisis regresi moderasi pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan dengan GCG sebagai variabel moderasi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI pada periode 2014–2018, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan *return on asset* (ROA).
2. Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan *return on equity* (ROE).
3. *Good Corporate Governance* (GCG) dengan indikator kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan (ROA dan ROE).
4. *Good corporate governance* (GCG) dengan indikator ukuran dewan komisaris memperkuat pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan (ROA).
5. *Good corporate governance* (GCG) dengan indikator dewan komisaris independen memperlemah pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan (ROA).
6. *Good corporate governance* (GCG) dengan indikator ukuran dewan komisaris dan dewan komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan (ROE).

Saran

1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan pedoman selain GRI atau dapat membuat modifikasi indeks GRI yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.

2. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel control seperti ukuran perusahaan, leverage dan biaya R&D.
3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan kualitas audit sebagai variabel control ataupun variabel moderasi pada pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan.
4. Peneliti selanjutnya tidak hanya menggunakan nilai akuntansi saja tetapi juga menambahkan nilai pasar sebagai proksi untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan.
5. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan model penelitian dengan menambah variabel yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Barus, I. N. (2016). Pengaruh GCG terhadap Kinerja Keuangan dengan CSR sebagai Pemoderasi di Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol. 5 No. 1, pp. 479–488.
- Brigham E. F., & Houston J. F (2014). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Cakti, G. A. (2019). *Harapan Tinggi pada BUMN*. Diakses pada September 23, 2019, dari: kalimantan.bisnis.com/read/20161228/245/615361/harapan-tinggi-pada-bumn.
- Christanti N. & Mahastanti L. A. (2011). Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Investor dalam Melakukan Investasi. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, No. 3, pp. 37–51.
- Djamilah, S. & Surenggono. (2017). Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Pemediasi Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 9, No. 1, pp. 41–53.
- Fadillah, A. R. (2017). Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang terdaftar di LQ45. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 12, No. 1, pp. 38–52.
- Fitriya E. & Setyorini L. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perbankan dengan Size dan *Leverage Ratio* sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, Vol. 4, No. 1, pp. 42–53.

- Galant A. & Cadez S. (2017). Corporate Social Responsibility and Financial Performance Relationship: a Review of Measurement Approaches. *Economic Research*, Vol. 30, No. 1, pp. 676–693.
- Gantino, R. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 3 No. 2, pp. 19–32.
- Ghozali, H. I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*.
- Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate Social and Environmental Reporting. *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, pp. 47–77.
- Irma, A. D. (2019). Pengaruh Komisaris, Komite Audit, Struktur Kepemilikan, Size dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 7, No. 3, pp. 697–712.
- Jayanti, K. R. & Husaini, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 59 No. 1, pp. 16–22.
- Kabir, R. & Thai, H. M. (2017). Does Corporate Governance Shape the Relationship between Corporate Social Responsibility and Financial Performance. *Pacific Accounting Review*, Vol. 29 No. 2, pp. 227–258.
- Kemerink, W. (2018). *The Moderating Role of Ownership and Board Structure in the Effect of Corporate Social Responsibility on Firm Performance*.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006, Oktober 17). Retrieved from ecgi.global: https://ecgi.global/sites/default/files//codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf
- Larasati, S., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Seminar Nasional IENACO*, pp. 579–586.
- Laurent & Salim S. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan di BEI. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Vol. 1, No. 2, pp. 135–144.
- Lesmana, D., Maimunah, M., & Panjaitan, D. (2016). Pengaruh Corporate Governance terhadap Hubungan antara Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Kinerja. *Jurnal Ilmiah MBIA*, Vol. 15, No. 2, pp. 95–104.

- Listyaningsih, E., Dewi, R., & Baiti, N. (2017). The Effect Good Corporate Governance on Corporate Social Responsibility disclosure on Jakarta Islamic Index. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, Vol. 4, No. 3, pp. 273–281.
- Madichie. (2018). Effect of Corporate Social Responsibility on Financial Performance of Selected Oil and Gas Firms in Nigeria. *European Journal of Business and Management*, Vol. 10, No. 21, pp. 38–47.
- Mansaray A. P., Yuanyuan L., & Brima S. (2017). The Impact of Corporate Social Responsibility disclosure on Financial Performance of Firms in Africa. *International Journal of Economic and Financial Issues*, Vol. 7, No. 5, pp. 137–146.
- Parengkuan W. E. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui Pojok Bursa FEB-UNSRAT. *Jurnal EMBA*, Vol. 5, No. 2, pp. 564–571.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang baik. Jakarta.
- Pratiwi, A. (2016). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, pp. 55–76.
- Rimardhani, H., Hidayat, R. R., & Dwiatmanto. (2016). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas Perusahaan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 31, No. 1, pp. 167–175.
- Riyadh H. A., Sukoharsono E. G., & Alfaiza S. A., (2019). *The Impact of Corporate Social Responsibility Disclosure and Board Characteristics on Corporate Performance*, Vol. 6, pp. 1–18.
- Rokhlinasari, S. (2016). Teori-teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility Perbankan. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 7, No. 1, pp. 1–11.
- Ross, S. A. (1977). The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signalling Approach. *The Bell of Journal of Economics*, Vol. 8, No. 1, pp. 23–40.
- Sakti Y. S. & Pudjolaksono E. (2017). Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI

- periode 2012–2015. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi (JATI)*, Vol. 11, pp. 1–16.
- Sarafina, S. & Saifi, M. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan dan Nila Perusahaan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 50 No. 3, pp. 108–117.
- Sari W. A., Handayani S. R., & Nuzula N. F. (2016). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 39, No. 2, pp. 74–83.
- Sahla, W. A. & Aliyah, S. S. R. (2016). Pengungkapan Corporate Social Responsibility berdasarkan Global Reporting Initiatives (GRI). *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2 (1), 1–18.
- Sembiring, E. R. (2005). Karakteristik perusahaan dan tanggung jawab sosial: studi empiris pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*.
- Suciwati, D. P., Pradnyan, D. P., & Ardina, C. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol.12 No.2, pp. 104–113.
- Sudaryanti D. & Riana Y. (2017). Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, pp. 19–31.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta.
- Wang, Z. & Sarkis, J. (2017). Corporate Social Responsibility Governance, Outcomes, and Financial Performance. *Journal of Cleaner Production*, pp. 1–37.
- Wardhani, J. V., Widianingsih, L. P., & Karundeng, F. (2019). The Effect of Company Size, Profitability, Leverage, and Management Ownership towards the Level of Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure. *Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology*, Vol. 1, No. 1, pp. 32–48.

Yuan Hu (2016). Does Ownership Type Matter for Corporate Social Responsibility disclosure: Evidence from China. *Global Conference on Business and Finance Proceedings*, Vol. 11, No. 1, pp. 183–197.